|  |
| --- |
| BADAN KEUANGAN DAERAH  PROVINSI SUMATERA BARAT |
| LAPORAN SIMONEV |
| TAHUN 2020 |



|  |
| --- |
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah “ **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** “, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

**Tabel 1.1**

**Keterkaitan RPJMD dengan Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **ARAH KEBIJAKAN** | | **PROGRAM PRIORITAS** | **URUSAN** | **SKPD** |
| **Misi 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional**  **Prioritas 2 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan** | | | | | |
| Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | 1. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kompetensi aparatur pengelolan keuangan daerah 5. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pembinaan dan fasilitasi keuangan Kabupaten/Kota | | Fungsi lain (urusan otonomi daerah) | BADAN KEUANGAN DAERAH |

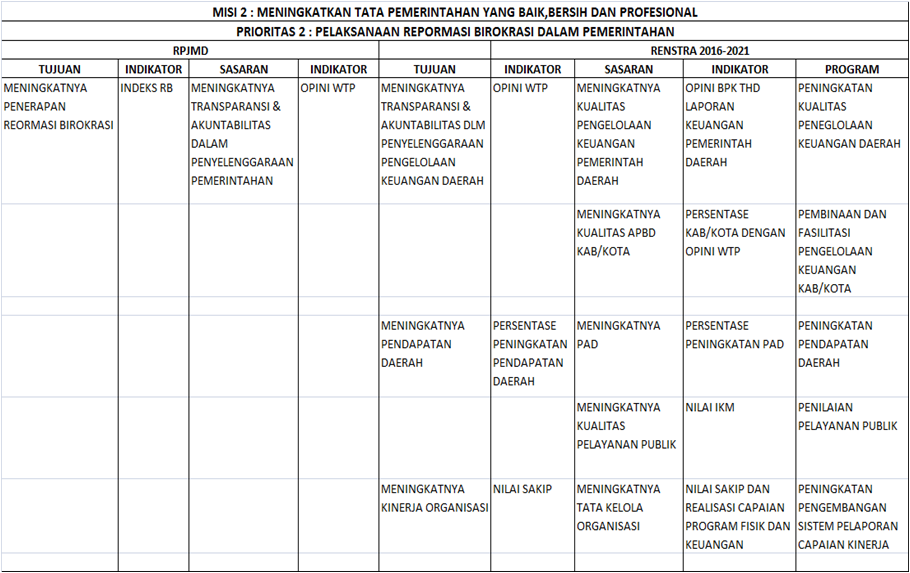
Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Keuangan Daerah terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

**Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan**

**Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Dalam Rencana Strategis 2016-2021 Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuannya yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**

**Tujuan Renstra 2016-2021 Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan Renstra** | **Tujuan Revisi Renstra sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2019** |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah |
| 2. | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah | Meningkatnya pendapatan daerah |
| 3. | Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota | Meningkatnya kinerja organisasi |
| 4. | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Aspiratif dan Partisipasif |  |

Sementara itu untuk indikator kinerja Pemerintah Provinsi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel1.4

Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Badan Keuangan Daerah

Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET  2020 |
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahaan | Opini BPK | WTP |

Dalam rangka memenuhi sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, strategi yang dilakukan adalah perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Sasaran meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota, strategi yang dilakukan adalah evaluasi APBD Kabupaten/Kota sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah, strategi yang dilakukan adalah perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayan publik,strategi yang dilakukan adalah memenuhi sarana dan prasarana UPTD PPD Badan Keuangan Daerah.
5. Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi,strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan pada SOP serta evaluasi dan pengawasan.

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat (terlampir).

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.5**

**Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN  STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | - Opini BPK | WTP |
| 2 | Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota | - Persentase Kabupaten /Kota dengan Opini WTP | 100 |
| 3 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | - Persentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah | -8,14 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | - Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik |
| 5 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas | - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | A |

**Tabel 1.6**

**Prgram Kegiatan Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar TA 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROGRAM** | **ANGGARAN** | | **KETERANGAN** | |
|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 11.685.085.360,- |  |  |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 6.593.819.476,- |  |  |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 206.250.000,- |  |  |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 334.098.000,- |  |  |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 2.041.286.592,- |  |  |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. | 5.910.726.370,- |  |  |
| 7 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp. | 735.504.800,- |  |  |
| 8 | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | Rp. | 6.940.473.189,- |  |  |
| 9 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Rp. | 2.054.306.706,- |  |  |
| **TOTAL** | | **Rp.** | **36.501.550.493,-** |  |  |

**BAB II**

**PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**PADA RENJA 2020 DAN RESTRA 2016-2021**

Dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Badan keuangan Daerah provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Renstra Bakeuda tahun 2016-2021. Untuk Program dan kegiatan tahun 2020 antara Renstra dan Renja sama yaitu 9 program dimana untuk urusan ada 4 program. Sedangkan kegiatan dan pagu untuk renja 2020 mengacu pada pagu Renstra dan kegiatan yang ada pada Renstra. Berikut ini adalah nama program dan kegiatan yang ada pada Renja 2020 dan juga sama dengan yang ada dalam renstra sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
   4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
   5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
   7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-Undangan
   9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan LuarDaerah
   10. Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi
   11. PenyediaanJasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
   12. Penyediaan Makanan dan Minuman
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Pembangunan Gedung Kantor
   2. Pengadaan Meubiler
   3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   5. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
   6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
   7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
   8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
   2. Penatausahaan Keuangan SKPD
   3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   4. Pengelolaan, Pegawasan dan Pengendalian Aset SKPD
6. **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
   2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
   3. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara
   4. Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi
   5. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
   6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
   7. Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeserandan DPA-OPD Perubahan
   8. Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
   9. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
   10. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
   11. Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional
   12. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat
   13. Rekonsiliasi Dana Tranfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian
   14. Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran
   15. Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD di Lingkup Provinsi Sumatera Barat
   16. Pembahasan RKA OPD dan DPPA OPD, RKA-OPD Kegiatan Baru
   17. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
   18. Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
7. **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
   2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat
   3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kabupaten/Kota
   4. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota
8. **Program Peningkatan Pendapatan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
   2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain
   3. Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan
   4. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah
   5. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain
   6. Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah
9. **Program Peningkatan Pelayanan Publik,** dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penilaian Pelayanan Publik
   2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link

**BAB III**

**CAPAIAN TARGET KINERJA**

**DAN PENYERAPAN ANGGARAN**

Gambaran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1. CAPAIAN KINERJA

Gambaran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN  STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | - Opini BPK | WTP | WTP | 100 |
| 2 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | - Persentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah | -8,14 | -3,31 | 160 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota | - Persentase Kabupaten /Kota dengan Opini WTP | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | - Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 |
| 5 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas | - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | A | A | 100 |

Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh realisasi target Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat bahwa indikator kinerjanya adalah opini BPK dengan target WTP. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN  STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK | WTP | WTP | 100 |

Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah, karena ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 realisasi indikator kinerjanya WTP dengan capaian 100%. Pada tahun 2018 Pemerintah Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat yang mana penghargaan itu didapat karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP 6 kali berturut turut. Di Indonesia didapat oleh 8 (delapan) Provinsi, yaitu Prov. Sumbar, Prov. Kep.Riau, Prov. Jabar, DI.Yogyakarta, Prov. NTB, Prov. Kalsel, Prov. Sulteng dan Prov. Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 pada tanggal 20 September 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 3.1.

Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut (2013-2017)



Pada tanggal 3 November 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendapat penghargaan dari Indonesia Award 2019 Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Jakarta. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari media GATRA kategori Opimalisasi Anggaran. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Media Group, Hendri Firzani kepada Gubernur Irwan Prayitno di Bogor tanggal 1 Desember 2019.

Untuk mencapai opini WTP, seluruh SKPD mempunyai peranan penting, dimana dengan tiga SKPD yang menjadi penanggungjawabnya yaitu Badan Keuangan Daerah, Biro AP2BMD, dan Inspektorat. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang meliputi pemeriksaan keuangan,pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak laporan keuangan tahun 2012.Keberhasilan Pemda Sumatera Barat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan PemerintahProvinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan BidangPerbendaharaan (selaku Bendahara Umum Daerah);

- Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;

- Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;

- Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);

- Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI;

- Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Pajak Daerah dan Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Rekonsiliasi BidangAkuntansi dan Pelaporan dengan 49 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).

- Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD terkait penyusunan laporan keuangan.

1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPDdan Biro AP2BMD (untuk Aset Tetap);

- Rekonsiliasi Bidang Akuntansi danPelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari (untuk Dana Bergulir).

1. Untuk membantu SKPD dalammelaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Keuangan Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.
2. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah(SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator SIPKD, yaitu Operator Anggaran, Operator Penatausahaan dan Operator Pertanggungjawaban.
3. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk meyakinkanbahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPDmaupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi Biro AP2BMD.
6. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapp* yaitu *Help Desk* SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD.

Faktor penghambatuntuk mempertahankan Opini BPK :

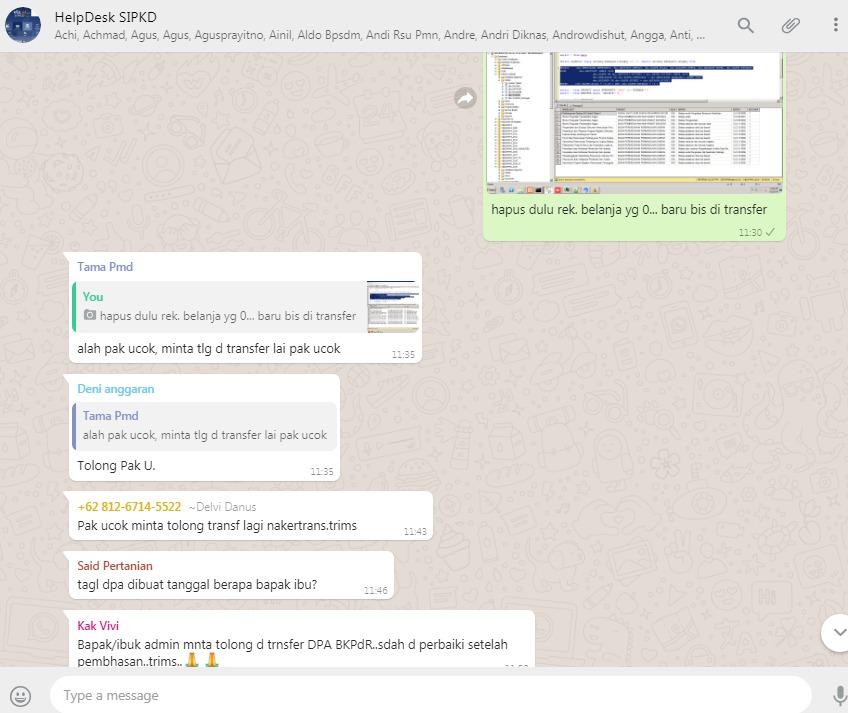
1. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang:

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.
6. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapp* yaitu *Help Desk* SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD.

**Gambar 3.2**

**Screenshoot Whatsapp Group Helpdesk SIPKD**



**Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:**

Program : Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp. 858.847.400,-
2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar Rp. 120.684.800,-
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 866.616.200,-
4. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 252.897.250,-
5. Verifikasi DPA-OPD, DPPA-OPD dan Pergeseran DPA-OPD dengan anggaran sebesar Rp. 383.471.341,-
6. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 64.335.900,-
7. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan anggaran sebesar 684.849.700,-
8. Penetapan Pengelola Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 93.875.100,-
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Baratdengan anggaran sebesar Rp. 20.002.400,-
10. Rekonsiliasi Dana Tranfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dengan anggaran sebesar Rp. 251.229.600,-
11. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 616.866.900,-
12. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya dan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada akhirnya akan bermuara kepada beberapa indikator kinerja yang menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Outcome dari program ini yaitu meningkatnya pengelolaan kualitas APBD Kabupaten/Kota. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALI SASI | % |
| 2 | **Meningkatnya**  **Kualitas APBD**  **Kabupaten/Kota**  **Meningkatnya**  **Kualitas APBD**  **Kabupaten/Kota** | - Persentase Kab/Kota dengan  opini WTP | 100 | 100 | 100 |

Untuk penilaian indikator ini diambil dari laporan keuangan Kab/Kota tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, sebab apabila diambil data tahun yang bersangkutan maka data yang diperlukan belum tersedia karena ketika laporan kinerja ini dibuat pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kab/Kota sedang berjalan. Untuk itu tahun 2020 memakai hasil pemeriksaan tahun 2019 yang mana hasil pemeriksaan tahun 2019 keluarnya pada bulan Juni tahun 2020. Pada tahun 2017 persentase Kab/Kotayang berhasil meraih opini BPK dengan Opini WTP ditargetkan 85%,dan realisasinya yaitu 90%,dimana dari 19 Kab/Kota ada 2 Kab/Kota yang meraih penilaian WDP yaitu Kab Solok dan Kab.Kepulauan Mentawai.Di tahun 2018 persentase Kab/Kota dengan opini WTP ditargetkan 90% dan realisasi 100%. Tahun 2019 opini BPK untuk seluruh Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat hasilnya adalah WTP yang keluar tahun 2020.

**Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:**

Program : Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 381.964.515,-
2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp. 26.225.900,-
3. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 9.047.400,-

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK Kab/Kota :

1. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dalam bentuk sosialisasi dan asistensi dalam penyusunan Perda APBD Kab/Kota.
2. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang terbaru
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Peningkatan PendapatanAsli Daerahtahun 2020 adalah :

* 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutandanregulasipenyesuaiantarifpungutansertapenyederhanaansistem prosedurpelayanan.
  2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhikewajibannya.
  3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuananggaran.
  4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat CFD, Samsat Malam Minggu, Samsat Nagari, Samsat MPP dan pengembangan Samsat Online.
  5. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaranmasyarakat.
  6. RevitalisasiBUMDmelaluiberbagaiupaya diantaranya pengelolaanBUMDsecara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peranBadanPengawas,agarBUMDberjalansesuaidenganperaturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
  7. Optimalisasipemberdayaandanpendayagunaanasetyangdiarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
  8. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
  9. Kerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilandalamupayapeningkatankesadaranmasyarakatdalam pembayaranpajak.
  10. Mengadakan rapat koordinasi bersama Kanwil Pajak Sumbar-Jambi dengan Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se Sumateara Barat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta memonitor penyetoran PPh Pasal 21 dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat.

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % |
| 3 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | -8,47 | -3,31 | 160 |

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.528.472.797.867,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.174.615.145.097,00sedangkan realisasinya tercapai sebesar 103,50 persen dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 80,41 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**

**Target, Realisasi,dan Kontribusi Rincian PAD**

**Provinsi Sumatera BaratTahun Anggaran 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **APBD Tahun Anggaran 2020** | | **Realisasi** | | **Kontribusi terhadap PAD (%)** |
| **Murni (Rp)** | **Perubahan (Rp)** | **Rp** | **%** |
| **Pajak Daerah** | 1.956.425.000.000,00 | 1.729.790.540.000,00 | 1.809.807.023.047,00 | 104,63 | 80,41 |
| **Retribusi Daerah** | 11.377.502.768,00 | 8.533.127.076,00 | 7.926.595.873,00 | 92,89 | 0,35 |
| **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** | 110.239.356.256,00 | 103.900.375.092,00 | 94.747.256.568,00 | 91,19 | 4,21 |
| **Lain-lain PAD Yang Sah** | 450.430.938.843,00 | 332.391.102.929,00 | 338.332.355.605,41 | 101,79 | 15,03 |
| **Jumlah PAD** | 2.528.472.797.867,00 | 2.174.615.145.097,00 | 2.250.813.231.093,41 | 103,50 | 100,00 |

*Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI*

Tabel 3.6

Perbandingan Peningkatan PAD Tahun 2016-2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi | Perbandingan peningkatan realisasi PAD dari tahun sebelumnya |
| 2016 | Rp. 1.964.148.975.798,55 | 4,66% |
| 2017 | Rp. 2.134.010.519.503,41 | 8,65% |
| 2018 | Rp. 2.275.090.068.586,90 | 6,61% |
| 2019 | Rp. 2.328.432.873.686,19 | 2,34% |
| 2020 | Rp. 2.251.335.223.743,41 | -3,31% |
| Rata-rata | | 3,79% |

Grafik 3.1

Peningkatan PAD Tahun 2016-2020

Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya yaitu :

**1. Peningkatan Pelayanan melalui :**

-Optimalisasi operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan bus yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia sebanyak 13 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus Samsat Keliling pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan adanya Pelayanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL); danb) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.

* + - Mengoperasikan Layanan Samsat *Drive Thru* yang telah adadi Kota Padang dan Bukittinggi,dan pada tahun 2019 ini sudah dibangun samsat *Drive Thru* di Payakumbuhdan tahun 2020 sudah beroperasional
    - Galeri Samsat merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang Lantai 3 Nomor 23C, serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di Plaza Bukittinggi lantai 2 Blok B31 dan B32.
    - Operasional Fitur Samsat *Anywhere* diresmikan pada tanggal 8 Desember 2016, dimana sebelum ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan pada Kantor Samsat atau pos pembayaran lainnya tempat kendaraan tersebut terdaftar. Kebutuhan untuk melakukan pembayaran tanpa dibatasi oleh regional dimana kendaraan tersebut terdaftar semakin hari semakin dibutuhkan, sehingga dengan adanya fasilitas ini batasan regional tidak ada lagi.
    - Pada tanggal 18 September 2017 telah diresmikan Samsat Nagari. Samsat Nagari ini merupakan pelayanan yang lebih didekatkan lagi kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membayar pajak di Kantor Nagari setempat. Pada saat itu Samsat Nagari baru beroperasi di 2 Nagari yaitu: Nagari Koto Baru di Kab. Solok dan Nagari Pasir Talang Barat di Kab. Solok Selatan. Peresmian Samsat Nagari Ini juga dihadiri oleh Kepala Korp Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Irjen Pol Drs. Royke Lumowa M.M, selain itu juga diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja.
    - Tahun 2020 Samsat Nagari berjumlah 6 unit. Adapun Kab/Kota yang telah memiliki Samsat Nagari adalah :

1. Kabupaten Solok
2. Kabupaten Solok Selatan
3. Kabupaten Painan
4. Kabupaten Dharmasraya
5. Kabupaten Pasaman
6. Kabupaten Lima Puluh Kota
7. **Melakukan pengawasan yang terdiri dari :**

- Mengintensifkanpelaksanaan razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD.

- Monitoring tata tertib administrasi pemungutan danpenata-usahaan di seluruh UPTD.

- Mengintensifkan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo kendaraannya.

- Mengintensifkan pengiriman Surat Peringatan PajakDaerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.

- Melakukan sosialisasi melalui *mass media*, brosur, spanduk, serta papan reklame.

- Memaksimalkan penerapan aplikasi e-Samsat untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (wajib pajak).

Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi | Perbandingan peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun sebelumnya |
| 2016 | 1.522.119.229.710,59 | 5,29% |
| 2017 | 1.626.923.373.074,36 | 6,89% |
| 2018 | 1.797.677.158.644,93 | 10,50% |
| 2019 | 1.872.933.990.718,00 | 4,19% |
| 2020 | 1.809.807.023.047,00 | -3,37% |
| Rata – rata | | 4,70% |

Grafik 3.2

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

**Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:**

Program : Peningkatan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dengan anggaran sebesar Rp. 119.104.000,-
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 17.127.000,-
3. Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 35.753.200,-
4. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 204.230.900,-
5. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 58.683.300,-
6. Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.157.078.245,-
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Strategi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan tatanan normal baru selama pandemi Covid-19 adalah dalam bentuk :

1. Proses bisnis

Melakukan penyederhanaan proses dan standar oprasional prosedur pelayanan dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi.Salah satu yaitu dengan menggunakan aplikasi SALMONAS mengunakan HP Android. Dimana pada aplikasi ini dapat dilakukan pembayaran pajak sencara online.

1. Publikasi

Untuk informasi yang baru disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media publikasi seperti radio.

1. Pengaduan online

Bagi wajib pajak yang kurang puas terhadap pelayanan pajak dapat menggunakan media sistem online berupa SPAN LAPOR dan CHAT ONLINE dengan situs www//dpkdsumbar.go.id

1. Protokol kesehatan

Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk pelayanan wajib pajak.

Untuk mengukur sasaran strategis kualitas pelayanan pelayanan publik yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap wajib pajak biasanya dilakukan dengan melakukan survei IKM.Tahun 2020 ini dianggarkan kegiatan survei IKM namun karena adanya recofusing anggaran maka kegiatan tersebut tidak ada.Tapi mengingat tingkat kepuasan masyarakat merupakan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah maka dilakukan dengan cara menggunakan kartu puas,kurang puas, dan tidak puas yang ditetapkan pada tempat pelayanan pajak.

Metode yang dipakai dalam menentukan seberapa puas masyarakat menerima pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD Badan Keuangan Daerah. Berupa memberikan partisipasi dengan memilih Kartu Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas sesuai dengan warna masing-masing, lalu memasukkannya ke dalam Kotak pelayanan. Dengan memberikan warna Merah = Tidak Puas, Kuning = Kurang Puas dan Hijau = Puas

Kepuasan Pelayanan adalah salah satu bentuk konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh UPTD. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilihat dari hasil rekap kartu yang ada dalam kotak pelayanan yang diberikan oleh masyarakat yang dilaksanakan pada 18 UPTD PPD Badan Keuangan Daerah. Dari hasil kartu tersebut direkap datanya, dimana hasil indeks kepuasan pelayanan secara keseluruhan adalah berupa puas dengan kategori B.

Gambaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN  STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | - Indek Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 |

**Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:**

Program : Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link dengan anggaran sebesar Rp. 1.240.180.600,-
2. Tata Kelola Organisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya. Dimana nilai yang diambil adalah nilai tahun lalu. Pada tahun 2016 yang lalu nilai kinerja dari Badan Keuangan Daerah mendapat nilai 78,77% dan berada dalam katagori penilaian BB. Dan di tahun 2017 kemaren mendapatkan nilai 81,26% atau dengan kategori A.Tahun 2018 nilai 83,01% dengan kategori A. Tahun 2019 dengan nilai 83,20 dengan nilai A.

Tabel 3.9

Nilai Evaluasi Akuntabilitas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN  STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % |
| 5 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | A | A | 100 |

1. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program kerja untuk mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan dana APBD 2020, seperti terurai dalam program berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
9. Program Penilaian Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahuiBadan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 81.470.501.464,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.458.144.623,- (96,30%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2020 dimaksud.

**Tabel 3.10**

**Realisasi Belanja**

**Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN BELANJA** | **TARGET**  **(Rp)** | **REALISASI** | | |
| **% FISIK** | **KEUANGAN**  **(Rp)** | **%** |
| **1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **50.763.388.129,-** | **100,00** | **50.087.111.674,-** | **98,67** |
|  | * + 1. Gaji dan Tunjangan | 16.919.057.725,- | 100,00 | 16.592.581.076,- | 98,07 |
|  | * + 1. Tambahan Penghasilan PNS | 5.756.814.204,- | 100,00 | 5.615.753.396,- | 97,55 |
|  | * + 1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 28.087.516.200,- | 100,00 | 27.878.777.202,- | 99,26 |
|  | | | | | |
| **2.** | **BELANJA LANGSUNG** | **30.707.113.335,-** | **100,00** | **28.371.032.949,-** | **92,39** |
|  | | | | | |
|  | **JUMLAH BELANJA** | **81.470.501.464,-** | **100,00** | **78.458.144.623,-** | **96,30** |

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Program dan Kegiatan Pokok yang mempunyai 5 program dan 27 kegiatan, sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan sebanyak 4 program dengan 30 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **ANGGARAN TAHUN 2020** | **REALISASI** | | |
| **FISIK (%)** | **KEUANGAN (Rp)** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **BELANJA LANGSUNG POKOK** | **18.321.822.584,-** | **100** | **17.165.168.706,-** | **93,69** |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 10.856.269.767,- | 100 | 10.344.570.679,- | 95,29 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 5.643.027.137,- | 100 | 5.098.102.970,- | 90,34 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 194.250.000,- | 100 | 185.102.000,- | 95,29 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.628.275.680,- | 100 | 1.537.393.057,- | 94,42 |
|  | **BELANJA LANGSUNG URUSAN** | **12.385.290.751,-** |  | **11.205.864.243,-** | **90,48** |
| 1 | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 5.591.976.645,- | 100 | 5.002.235.788,- | 89,45 |
| 2 | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan | 5.135.895.691,- | 100 | 4.662.443.220,- | 90,48 |
| 3 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 417.237.815,- | 100 | 401.414.518,- | 96,21 |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 1.240.180.600,- | 100 | 1.139.770.717,- | 91,90 |
|  | **JUMLAH** | **30.707.113.335,-** | **100** | **28.371.032.949,-** | **92,39** |

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 92,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar 96,21% dan diikuti dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik 91,90%,lalu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 90,48% dan Program Peningkatan Pendapatan Daerah 89,45%.

Capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**

**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Kebijakan** | **Target dalam dokumen anggaran** | **Realisasi** | **Capaian Kinerja**  **(%)** | **Alokasi anggaran** | **Realisasi anggaran** | **Persentase realisasi**  **(%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***I*** | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | ***Program Penunjang OPD*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kegiatan Penunjang OPD | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 6.150.000,00 | 5.846.432,00 | 95,06 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kegiatan Penunjang OPD | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 3.048.392.000,00 | 2.766.705.151,00 | 90,76 |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | Penyediaan :  - pengaman kantor 41 orang:  - petugas kebersihan 57 orang;  - sopir 27 orang | Tersedianya :  - pengaman kantor 41 orang:  - petugas kebersihan 57 orang;  - sopir 27 orang | 100 | 57.768.000,00 | 57.761.000,00 | 99,99 |
| 4 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Kegiatan Penunjang OPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.000.000,00 | 600.000,00 | 20,00 |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 516.960.000,00 | 515.120.000,00 | 99,64 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kegiatan Penunjang OPD | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 836.869.000,00 | 830.435.600,00 | 99,23 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 75.947.600,00 | 74.656.600,00 | 98,30 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kegiatan Penunjang OPD | Tersedianya :  - koran 432 eks;  - warta perundang-undangan 12 eks  - majalah 24 eks | Tersedianya :  - koran 432 eks;  - warta perundang-undangan 12 eks  - majalah 24 eks | 100 | 57.768.000,00 | 57.761.000,00 | 99,99 |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke  - dalam daerah 24 eks  - luar daerah 44 kali | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke  - dalam daerah 24 eks  - luar daerah 44 kali | 100 | 1.414.567.252,00 | 1.249.860.134,00 | 88,36 |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kegiatan Penunjang OPD | Tersedianya:  - makan rapat 2380 kotak  - snak rapat 2380 kotak | Tersedianya:  - makan rapat 2380 kotak  - snak rapat 2380 kotak | 100 | 118.144.000,00 | 100.793.800,00 | 85,31 |
| 11 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Kegiatan Penunjang OPD | Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali | Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali | 100 | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | 25,00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur sebanyak 33 kali | Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur sebanyak 33 kali | 100 | 137.400.000,00 | 129.685.797,00 | 94,39 |
| ***II*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | ***Kegiatan Penunjang OPD*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan Gedung | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok | Terlaksananya pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok | 100 | 114.101.800,00 | 113.949.600,00 | 99,87 |
| 2 | Pengadaan Meubiler | Kegiatan Penunjang OPD | Tersedianya:  - kursi tunggu 20 unit  - rak file 5 unit  - dll | Tersedianya:  - kursi tunggu 20 unit  - rak file 5 unit  - dll | 100 | 445.960.000,00 | 435.336.000,00 | 97,62 |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | Tersedianya:  - genset 3 unit  - lemari besi 10 unit  - dll | Tersedianya:  - genset 3 unit  - lemari besi 10 unit  - dll | 100 | 2.431.164.175,00 | 2.143.058.500,00 | 88,15 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 606.661.000,00 | 563.949.818,00 | 92,96 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/ Dinas | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa:  - roda empat 34 unit  - roda dua 20 unit  - bus Samkel 13 unit | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa:  - roda empat 34 unit  - roda dua 20 unit  - bus Samkel 13 unit | 100 | 742.168.200,00 | 620.920.676,00 | 83,66 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan kantor | Kegiatan Penunjang OPD | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantorberupa:  - telepon 18 unit  - TV 32 unit  - dll | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantorberupa:  - telepon 18 unit  - TV 32 unit  - dll | 100 | 525.750.000,00 | 474.961.511,00 | 90,34 |
| 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | Kegiatan Penunjang OPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 369.757.448,00 | 363.848.465,00 | 98,40 |
| 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit | Terlaksananya rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit | 100 | 407.464.514,00 | 382.078.400,00 | 93,77 |
| ***III*** | ***Program Peningkatan Disiplin Aparatur*** | ***Kegiatan Penunjang OPD*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kegiatan Penunjang OPD | 280 stel | 280 stel | 100 | 194.250.000,00 | 185.102.000,00 | 95,29 |
| **IV** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Kegiatan Penunjang OPD** |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan | Kegiatan Penunjang OPD | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan | Kegiatan Penunjang OPD | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| ***V*** | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan*** | ***Program Penunjang OPD*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Perencanaandan Penganggaran SKPD | Kegiatan Penunjang OPD | Tersusunnya laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen | Tersusunnya laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen | 100 | 82.100.100,00 | 77.766.308,00 | 94,72 |
| 2 | Penatausahaan Keuangan SKPD | Kegiatan Penunjang OPD | Tersusunnya laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar | Tersusunnya laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar | 100 | 1.209.144.829,00 | 1.139.152.667,00 | 94,21 |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan Penunjang OPD | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 78.018.451,00 | 75.696.000,00 | 97,02 |
| 4 | Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD | Kegiatan Penunjang OPD | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit | 100 | 259.012.300,00 | 244.778.082,00 | 94,50 |
| ***VI*** | ***Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 120.684.800,00 | 119.388.252,00 | 98,93 |
| 3 | Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara |  | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| 4 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi | 1. PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah dan 3.Pergub Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis elektronik | Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis | Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis | 100 | 64.335.900,00 | 35.612.803,00 | 55,35 |
| 5 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar | Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar | 100 | 858.847.400,00 | 796.971.149,00 | 92,80 |
| 6 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku | Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku | 100 | 866.616.200,00 | 800.354.200,00 | 92,35 |
| 7 | Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubaha | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan | Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan | 100 | 383.471.341,00 | 378.248.341,00 | 98,64 |
| 8 | Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di Lingkungan Provinsi | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD dilingkup Provinsi serta terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota berupa 2 laporan | Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD dilingkup Provinsi serta terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota berupa 2 laporan | 100 | 101.422.400,00 | 93.142.323,00 | 91,84 |
| 9 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |  | Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen | Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen | 100 | 616.866.900,00 | 529.922.200,00 | 85,91 |
| 10 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD | PMK Nomor 74/PMK.o7/2016  2.Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah | Terlaksananya pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur | Terlaksananya pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur | 100 | 684.849.700,00 | 639.118.334,00 | 93,32 |
| 11 | Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial | Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen,dan 8 SK | Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen,dan 8 SK | 100 | 93.875.100,00 | 89.756.405,00 | 95,61 |
| 12 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara |  | 20.002.400,00 | 17.706.000,00 | 88,52 |
| 13 | Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD. | Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai, Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen | Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai, Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen | 100 | 251.229.600,00 | 226.085.870,00 | 89,99 |
| 14 | Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen | Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen | 100 | 226.409.350,00 | 153.391.860,00 | 67,75 |
| 15 | Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD di Lingkup Provinsi Sumatera Barat |  | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| 16 | Pembahasan RKP-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Tahun 2019 | Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008 | Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan | Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan | 100 | 414.387.350,00 | 381.093.350,00 | 91,97 |
| 17 | Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) | * Surat Menteri Keuangan Nomor S-2/MK.07/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020. * Amandemen 2 Januari 2020 Manual Manajemen Program (Program Management Manual/PMM) Program Hibah Jalan Daerah.   - Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Program Hibah Jalan Daerah Nomor PHD-06/MK.07/2020 tanggal 13 Maret 2020 | Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen | Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen | 100 | 180.000.000,- | 166.592.143,00 | 92,00 |
| ***VII*** | ***Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen | Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen | 100 | 381.964.515,00 | 368.276.896,00 | 96,42 |
| 2 | Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat | -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 91 s/d 93 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 309 dan 310 | Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa 1 kegiatan FGD | Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa 1 kegiatan FGD | 100 | 26.225.900,00 | 26.225.900,00 | 100 |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota | - | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| 4 | Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota | Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat | Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen | Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen | 100 | 9.047.400,00 | 6.911.722,00 | 76,39 |
| ***VIII*** | ***Program Peningkatan Pendapatan Daerah*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB | Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 119.104.000,00 | 114.436.325,00 | 96,08 |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain |  | 1 angkatan | 1 angkatan | 100 | 17.127.000,00 | 16.173.250,00 | 94,43 |
| 3 | Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan |  | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon | 100 | 35.753.200,00 | 22.513.377,00 | 62,97 |
| 4 | Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah |  | Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL,Naskah Akademis dan Peraturan Gubernurberupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub | Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL,Naskah Akademis dan Peraturan Gubernurberupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub | 100 | 204.230.900,00 | 187.012.165,00 | 97,39 |
| 5 | Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain |  | Tersedianyan laporan koordinasi,evaluasi rencana penerimaan tahun 2020 sebanyak 4 dokumen | Tersedianyan laporan koordinasi,evaluasi rencana penerimaan tahun 2020 sebanyak 4 dokumen | 100 | 58.683.300,00 | 56.522.900,00 | 96,32 |
| 6 | Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah | Perda No 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 | Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.729.790.540.000,- | Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.809.808.841.129,- | 104,63% | 5.157.078.245,00 | 4.605.577.771,00 | 89,31 |
| **IX** | **Program Peningkatan Pelayanan Publik** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penilaian Pelayanan Publik |  | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 | Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19 |  |  |  |  |
| 2 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link | 1. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor  2.Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik  2.Pergub Nomor 32/Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaran Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik | Aplikasi Samsat Link berjalandengan baik selama 1 tahun | Aplikasi Samsat Link berjalandengan baik selama 1 tahun | 100 | 1.240.180.600,00 | 1.139.770.717,00 | 91,90 |

**BAB IV**

**FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT**

Faktor Pendorong yaitu :

* + - * 1. Verifikasi Renja sudah berpedoman pada Renstra dan RPJMD
        2. Verifikasi Renja sudah berpedoman pada RKPD
        3. Merupakan kegiatan prioritas sehinggah pelaksanaannya harus sesuai target
        4. Adanya informasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan program
        5. Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan secara berkala
        6. Adanya sarana dan prasarana

Faktor Penghambat yaitu :

Adanya recofusing anggaran karena pandemi Covic-19 akibatnya ada kegiatan yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan

Terdapatnya kesalahan rekening sehingga menunggu perubahan APBD

Pelaporan progres kegiatan tidak tepat waktu

Keterbatasan SDM pelaksana kegiatan

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Laporan Simonev Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Simonev Badan Keuangan Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang unit kerja dan UPTD PPD yang ada di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan SimonevBadan Keuangan Daerahmerupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPTD PPD di Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan Simonev dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik Bidang maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Keuangan Daerah 2016 – 2021. Program-program tersebut meliputi 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; 8) Program Peningkatan Pendapatan Daerah; dan 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2020terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 92,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 30.707.113.335,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja Langsung Urusan terdapat pada Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar 96,21% dan diikuti dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik 91,90%, dan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 90,78%,sedangkan yang terendah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 89,45%.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan konstribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician sebagai berikut :
4. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP. Sesuai dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar -3,31 dari target semula sebesar -8,471%, maka dapat disimpulkan capaian kinerjanya sebesar 160%.
6. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota dengan Opini WTP adalah 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
7. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di terealisasi Baik dari target baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terealisasi A sesuai target yang ditetapkan yaitu A dengan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Kinerja sasaran dimaksud adalah pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu:
10. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
11. Meningkatnyapendapatan daerah.
12. Meningkatnya kinerja organisasi.
13. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2020 ini ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
14. **LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik untukmenghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dangan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
3. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
5. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
6. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.